



### FORUM INVESTASI JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pemaparan saat menghadiri Forum Investasi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/2). Forum Investasi Jawa Barat dengan tema "Jawa Barat Juara Investasi" yang dihadiri oleh pelaku usaha tersebut ditujukan untuk mendorong investasi dalam memperkuat hilirasi dan kemitraan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat.

## Pedagang Pasar Kutabumi Resah, Tarif Relokasi Mencapai Rp120 Juta

Ini keputusan sepihak yang tidak berdasar. Uang puluhan sampai ratusan juta itu buat apa, kalau sewajarnya untuk bantu renovasi kami bersedia. Kami diancam kalau tidak mau bayar sewa kios atau los baru, kami tidak bisa berjualan di sini kembali," kata beberapa pedagang.

**TANGERANG (IM)**- Para pedagang Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dibuat resah dengan pihak yang mengatasnamakan pengelola pasar yang baru yakni Perumda Kerta Tirta Raharja dan PT Sarana Niaga Nusantara.

Keresahan para pedagang itu muncul setelah mereka diminta pihak pengelola pindah lokasi berdagang dengan ala-

san relokasi, dan permintaan uang lapak usaha berupa los dan kios baru yang dihargai antara Rp65 juta sampai dengan Rp120 juta.

"Tegas kami pedagang menolak untuk direlokasi pihak pengelola secara sepihak. Karena enggak ada mereka musyawarah ke kami," terang seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya, Selasa (28/2).

Lebih jengkelnya lagi, dia dan para pedagang lain yang telah menempati tempat usaha di pasar Kutabumi selama puluhan tahun ini, malah diminta membayar uang sewa kios dan los jika nanti ingin berjualan di pasar yang lama usai renovasi.

"Ini keputusan sepihak yang tidak berdasar. Uang puluhan sampai ratusan juta itu buat apa, kalau sewajarnya untuk bantu renovasi kami bersedia. Kami diancam kalau tidak mau bayar sewa kios atau los baru, kami tidak bisa berjualan di sini kembali," jelas dia.

Fatima, pedagang lainnya menerangkan para pedagang wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp2 juta, sebagai jaminan mendapatkan kios atau los yang baru.

"Lalu kami akan ditempatkan di pasar penampungan

sementara. Di mana pasar penampungan itu pun tidak diberitahu lokasinya di mana. Kami seperti beli kucing dalam karung," jelas i empat anak ini.

Kemudian, setelah terdaftar dan membayar Rp2 juta itu, para pedagang diwajibkan membayar harga kios Rp120 juta, dan los Rp65-73 juta oleh Perumda Kerta Tirta Raharja dan PT Sarana Niaga Nusantara.

Namun anehnya, para pedagang yang membayar seharusnya memiliki bukti legalitas atas tempat usaha kios dan los Pasar Kutabumi berupa Sertifikat Hak Guna Pakai yang berlaku hingga 2027 nanti.

"Sejak tahun 2000, Pasar Kutabumi dikelola oleh KOP-PASTAM (Koperasi Pedagang Pasar Taman) berdasarkan keputusan Bupati Tangerang No 511.2/KEP99-HUK tahun

2002. Tiba-tiba kami direlokasi dan dipungut uang untuk sewa kios dan los yang nanti akan direnovasi kan ini enggak masuk akal sementara SHGB kami sampai 2027," jelas dia.

Vera, pedagang lainnya mengakui dirinya dan pedagang lain di pasar Kutabumi juga mengalami intimidasi diduga dari pihak Perumda Kerta Tirta Raharja dan PT Sarana Niaga Nusantara.

"Mereka (Perumda Kerta Tirta Raharja) merekrut orang-orang lama, preman," jelas dia.

Sementara, Dirut Perumda Kerta Tirta Raharja, Finny Dewiyanti, belum bersedia memberikan tanggapan atas persoalan yang dikeluhkan ratusan pedagang pasar Kutabumi tersebut, ketika dihubungi melalui sambungan telepon. ● pp

## DPKP Kab. Tangerang Awasi dan Cegah Penyebaran Virus Avian Influenza

**TANGERANG (IM)**- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menyiapkan sejumlah langkah pencegahan dalam mewaspadai penyakit flu burung (H5N1) tipe 2.3.4.4b atau Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) yang dinyatakan telah masuk ke Indonesia.

Hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 16183/PK.320/F/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) sub tipe H5N1 Clade 2.3.4.4.

"Kami melakukan langkah-langkah kewaspadaan peningkatan kasus HPAI karena bersifat zoonosis," kata Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, Selasa (28/2).

Asep mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah sebagai upaya mewaspadai wabah tersebut, salah satunya mengaktifkan kembali PDSR (Participatory Disease Surveillance and Respon) dengan melakukan surveilans dan merespons apabila ada laporan dan ditemukan kasus yang mengarah kepada Avian Influenza.

Pembinaan bagi pemilik/peternak unggas juga dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pelaporan jika ditemukan tanda klinis yang mengarah kepada Avian Influenza seperti penurunan produksi dan kematian mendadak. Sementara itu, pengawasan pada lalu lintas ternak juga terus dilakukan.

"Kami juga merespon laporan/informasi dugaan

Avian Influenza dan berkoordinasi dengan Balai Veteriner Subang untuk pengambilan sampel. Lalu lintas ternak juga akan kami awasi, jika ada tanda klinis yang mengarah kepada Avian Influenza akan kami laporkan ke i-Sikhnas," katanya.

Asep menuturkan pihaknya juga turut berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi kenaikan kasus pada HPAI karena bersifat Zoonosis atau berpotensi menyebar ke manusia.

Diketahui, Avian influenza (AI) merupakan penyakit viral akut pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A subtype H5 dan H7. Virus influenza A tersebut dapat menyerang semua jenis unggas dengan angka kematian 100 persen.

"Penularan virus AI ini dapat terjadi melalui kontak langsung dari unggas terinfeksi dan unggas peka melalui saluran pernapasan, konjungtiva, lendir dan feses; atau secara tidak langsung melalui debu, pakan, air minum, petugas, peralatan kandang, sepatu, baju dan kendaraan yang terkontaminasi virus AI serta unggas hidup yang terinfeksi," ungkap Asep.

Diketahui, saat ini belum adanya temuan kasus ataupun pelaporan mengenai kasus flu burung yang terjangkit pada hewan unggas maupun penularan dari manusia ke manusia di wilayah Kabupaten Tangerang. Kendati demikian, Asep menuturkan pihaknya terus memonitor dan mengawasi agar tidak terjadinya penyebaran pada virus tersebut. ● pp

## DPRD NTT Kaget Soal Kebijakan Sekolah Jam Lima Pagi SMA/SMK

**KUPANG (IM)**- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengagetkan dengan kebijakan pemerintah provinsi setempat soal aktivitas sekolah untuk SMA dan SMK yang dimulai lebih awal pukul 05.00 Wita.

"Kebijakan ini memang mengagetkan kita semua dan DPRD juga belum diajak komunikasi terkait kebijakan ini," kata Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna di Kupang, Selasa (28/2).

Inche menyampaikan hal itu menanggapi polemik kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT yang baru disampaikan secara lisan soal aktivitas sekolah dimulai pukul 05.00 Wita dan aktivitas belajar mengajar dimulai pukul 06.30 Wita.

Inche mengatakan tidak pernah ada percakapan pihak pemprov dengan DPRD NTT terkait aturan tersebut

dan tiba-tiba aturan itu sudah diberlakukan di beberapa SMA/SMK sederajat di Kota Kupang.

"Jujur, kami dari DPRD kaget dengan kebijakan ini," tambahna.

Inche mengaku juga sudah mendapat laporan dari Komisi V DPRD NTT yang membicarakan pendidikan. Pada Rabu (1/3), DPRD NTT bersama dinas pendidikan akan menggelar rapat untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan yang kini jadi polemik di masyarakat itu.

Menurut Inche, jam masuk sekolah di Indonesia berkisar antara 6.30 hingga 8.30 pagi. "Saat ini kegiatan belajar mengajar di Indonesia termasuk yang paling pagi lainnya dibandingkan sekolah di seluruh dunia," ujarnya.

Dia juga mengatakan ada banyak riset yang menyebutkan bahwa waktu sekolah yang terlalu awal diduga berpotensi

mengurangi waktu tidur anak dan ini berisiko lebih besar mengganggu kesehatan mental anak yang sekolah.

Inche berharap kebijakan sekolah mulai pukul 05.00 Wita di NTT itu ditinjau kembali dan selama proses peninjauan, jadwal sekolah dikembalikan seperti yang berlaku selama ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Viktor B. Laikodot dalam pertemuannya dengan Dinas Pendidikan NTT dan sejumlah kepala sekolah dan guru-guru SMA sederajat meminta agar aktivitas sekolah khusus SMA dan SMK di NTT dimulai lebih awal pukul 05.00 Wita.

Pernyataan Gubernur Laikodot ini kemudian diviralkan melalui media sosial dan kini menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pengamat pendidikan. ● pra



### AKSES JALAN NASIONAL BOGOR-SUKABUMI PUTUS AKIBAT LONGSOR

Kondisi ruas jalan Jembatan Cikreteg yang longsor di akses jalan nasional Bogor-Sukabumi, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/2). Ruas jalan Jembatan Cikreteg longsor pada Senin (27/2) pukul 11.00 WIB akibat tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut sehingga semua arus lalu lintas kendaraan menuju ke lokasi itu ditutup total.

## Jalan Nasional di Lebak Rusak dan Bahayakan Pengendara

**LEBAK (IM)**- Jalan By Pass Sockarno Hatta. Bahkan, beberapa waktu lalu, jalan melintasi dua kecamatan di Kabupaten Lebak rusak parah sejak dua bulan lalu. Kondisi jalan berlubang dan licin ini sangat membahayakan para pengendara dan anak sekolah yang melintasi jalan tersebut.

Enjen, sopir angkot jurusan Mandala-Kalijaga mengatakan, sudah hampir dua bulan jalan nasional di Lebak dibiarkan rusak. Kondisi tersebut mengganggu arus lalu lintas dari Mandala menuju Malangnengah. Bahkan, kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

"Iya, sudah satu bulan lebih dibiarkan rusak. Padahal, ini jalan nasional dan menjadi akses utama masyarakat untuk bepergian keluar kota," kata Enjen, Selasa (28/2).

Dikatakan Enjen, para sopir angkot banyak yang mengeluhkan kerusakan jalan nasional di Lebak tersebut. Karena jalan berlubang ditemukan di sepanjang Jalan By

Pass Sockarno Hatta. Bahkan, beberapa waktu lalu, jalan tersebut ditanami pohon pisang oleh masyarakat.

"Masyarakat kesal dengan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Karena itu, mereka tanam pohon pisang. Kami pun kesal, karena kerusakan jalan membuat kendaraan cepat rusak dan lalu lintas tersendat," tegasnya.

Nisya, pengguna jalan asal Cibadak mengaku kecewa dengan Balai Pengelola Jalan Nasional Wilayah Banten yang tutup mata dengan kerusakan jalan nasional di Lebak. Jalan berlubang dan licin menghiasi jalan raya di ibu kota Kabupaten Lebak tersebut. Karena itu, dirinya berharap kerusakan jalan segera ditangani agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas.

"Harapannya diperbaiki. Karena jalan ini ramai dilalui masyarakat Lebak dan luar Lebak. Kalau dibiarkan maka akan jadi imej negatif bagi Lebak," tukasnya. ● pra

## Banjir Jepara Terus Meluas, Tagana Dirikan Dapur Umum

**JEPARA (IM)**- Ketinggian banjir di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, hingga Selasa (28/2) siang terus bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsosper-mades) bersama Taruna Siaga Bencana mendirikan dapur umum untuk tiga hari ke depan. Dalam sekali memasak, dapur umum menyiapkan 1.200 nasi bungkus untuk warga yang terdampak banjir.

Koordinator dapur umum, Maftukan, mengatakan untuk saat ini kondisi banjir terus naik akibat curah hujan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Jepara. Hingga Selasa siang, kondisi banjir di kabupaten Jepara terus meluas di dua desa pada dua kecamatan. Untuk warga yang terdampak banjir sejumlah 1.300 jiwa. Mereka masih bertahan di rumah masing-masing belum mau untuk mengungsi.

Akibat banjir tersebut, warga tidak bisa memasak. Untuk mencukupi kebutu-

han makan, Taruna Siaga Bencana mendirikan dapur umum untuk tiga hari ke depan. Dalam sekali memasak, dapur umum menyiapkan 1.200 nasi bungkus untuk warga yang terdampak banjir.

Koordinator dapur umum, Maftukan, mengatakan untuk saat ini kondisi banjir terus naik akibat curah hujan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Jepara. Hingga Selasa siang, kondisi banjir di kabupaten Jepara terus meluas di dua desa pada dua kecamatan. Untuk warga yang terdampak banjir sejumlah 1.300 jiwa. Mereka masih bertahan di rumah masing-masing belum mau untuk mengungsi. ● pra



### KETAHANAN PANGAN WANITA TANI

Kelompok Wanita Tani (KWT) Berlian (berkarya mengolah hasil pertanian) membawa tanaman bawang merah di Kampung Bungur, Desa Jalatrang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (28/2). Kampung tersebut memanfaatkan lahan tidak produktif untuk dijadikan kawasan pertanian dengan memberdayakan ibu rumah tangga menanam bawang, cabai, kangkung, bayam, sawi, tomat, kentang, dan ubi, guna mendukung program ketahanan pangan.

## Pengerjaan Proyek Infrastruktur Harus Miliki Dampak Besar Bagi Masyarakat

**TANGSEL (IM)**- Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benjamin Davnie meminta kepada dinas yang menangani pembangunan infrastruktur untuk melihat kebutuhan masyarakat, sehingga tidak asal bangun infrastruktur.

Hal itu ia utarakan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diikuti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Tangsel, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (DSDABMBK) Tangsel dan Dinas Perhubungan (Disub) Tangsel di Kampung Anggrek, Serpong, Kota Tangsel, Selasa (28/2).

"Yang kita diskusikan dalam Forum OPD ini rumusnya tidak hanya selesai di titik out come (penyelesaian pekerjaan-red) saja. Tapi harus sampai titik, benefitnya apa? Keuntungan apa buat masyarakat kita membangun infrastruktur?" ujar Benjamin. ● pp

Benjamin mengatakan, seperti misalnya DSD-ABMBK Tangsel melakukan pengerjaan proyek jalan 20 meter memakai material beton, maka yang harus diperhatikan adalah mengapa jalan tersebut harus dibangun dan setelah terbangun apakah memperlancar arus lalu lintas atau tidak.

"Jadi sampai kepada impact dan benefit. Tolong direncanakan seperti itu. Karena kalau hanya sekadar out come saja, rasanya program-program menjadi tidak maksimal," jelasnya.

Benjamin menambahkan, perkiraan di tahun 2024 adalah lahan Tangsel tidak akan bertambah, namun justru akan bertambah jumlah penduduknya. Setiap pertambahan penduduk akan membawa dampak pada layanan publik yang harus diwujudkan Pemkot Tangsel. "Maka terkait persoalan itu. Layanan publik apa yang akan dibuat mengantisipasi persoalan di atas," ujarnya. ● pp